BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa:

1. Pasal 27A UU ITE secara formil telah memenuhi syarat konstitusional pembatasan hak sebagaimana diatur Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, karena pembatasan tersebut ditetapkan melalui undang-undang dan bertujuan melindungi kehormatan serta nama baik seseorang. Namun dari segi materiil ketentuan ini masih menyisakan persoalan konstitusionalitas karena rumusan norma "menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal" bersifat umum, multitafsir, dan berpotensi menjadi "pasal karet". Kekaburan rumusan ini bertentangan dengan asas lex certa dan jaminan kepastian hukum yang adil pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga berisiko menimbulkan *chilling effect* yang mereduksi ruang kebebasan berekspresi yang dijamin Pasal 28E dan 28F UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memperkuat temuan ini dengan menegaskan bahwa frasa "orang lain" dalam Pasal 27A tidak boleh dimaknai mencakup lembaga pemerintah, institusi, korporasi, atau pejabat, sehingga pasal tersebut tidak dapat digunakan untuk membungkam kritik terhadap kekuasaan. Dengan demikian Pasal 27A UU ITE pada dasarnya konstitusional sebagai instrumen perlindungan kehormatan individu, tetapi keabsahannya bersifat kondisional, yakni bergantung pada penerapan yang proporsional dan tidak digunakan sebagai alat represi terhadap kebebasan berpendapat.
2. Dari perspektif fiqh siyasah kebebasan berpendapat *(hurriyah al-ra'yi)* diakui sebagai hak yang dijunjung tinggi, namun tetap dibatasi oleh larangan *syar'i* seperti ghibah, fitnah, dan tuduhan tanpa bukti *(qadzf).* Melalui kerangka *siyasah syar'iyyah* negara *(ulil amri)* memiliki

UIN IMAM BONJOL PADANG

kewenangan untuk mengatur ruang digital demi kemaslahatan umum khususnya dalam rangka *maqashid syariah* berupa *hifz al-'irdh* (menjaga kehormatan) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Prinsip ini diperkuat oleh kaidah *fiqhiyyah dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* dan konsep *maslahah mursalah*, yang keduanya membenarkan pembatasan sepanjang bertujuan mencegah kerusakan yang lebih besar. Meski demikian *fiqh siyasah* juga menegaskan bahwa kekuasaan tidak boleh bersifat absolut *(istibdad)* dan harus tunduk pada prinsip keadilan *(al-'adalah)* serta akuntabilitas melalui mekanisme *ahl al-hall wa al-'aqd*. Oleh karena itu penerapan Pasal 27A UU ITE hanya relevan dan sah menurut *fiqh siyasah* apabila digunakan secara proporsional untuk melindungi kehormatan bukan untuk membungkam kritik sah terhadap penguasa.

Secara keseluruhan penelitian ini menemukan adanya titik temu antara perspektif konstitusi dan *fiqh siyasah* dalam menilai Pasal 27A UU ITE. Kedua kerangka tersebut sama-sama mengakui kebebasan berekspresi sebagai hak yang penting namun tidak mutlak, menuntut kejelasan norma *(lex certa* dan *bayyinah/tabayyun*), menekankan prinsip proporsionalitas, menolak kekuasaan yang tidak terkontrol, serta menegaskan bahwa perlindungan kehormatan tidak boleh dijadikan tameng bagi penguasa untuk menghindari kritik. Dengan demikian, Pasal 27A UU ITE pada prinsipnya sah baik secara konstitusional maupun secara *fiqh siyasah* sebagai instrumen perlindungan kehormatan, tetapi keabsahannya bersifat bersyarat: harus dirumuskan secara jelas, diterapkan secara proporsional, dan konsisten dengan prinsip keadilan agar tidak berubah menjadi alat represi terhadap kebebasan berpendapat masyarakat.

UIN IMAM BONJOL PADANG

5.2 Saran

Demikian penelitian ini disusun sebagai upaya untuk menganalisis konstitusionalitas Pasal 27A UU ITE No. 1 Tahun 2024 dari perspektif hukum tata negara dan *fiqh siyasah*. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi cakupan data, jumlah putusan

pengadilan yang dikaji, maupun kedalaman analisis perbandingan lintas disiplin, sehingga masih terbuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih komprehensif, misalnya melalui pendekatan empiris terhadap penerapan Pasal 27A di lapangan.

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum tata negara dan *fiqh siyasah*, khususnya terkait pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital, serta memberikan kontribusi praktis bagi pembentuk undang-undang, penegak hukum, dan masyarakat agar Pasal 27A UU ITE diterapkan secara adil, proporsional, dan tidak disalahgunakan sebagai alat pembungkaman terhadap kritik yang sah. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan penelitian ini di masa mendatang.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mohammad. M. 2016. *Konstitusionalitas dan legalitas norma dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945*. dalam Jurnal Konstitusi. Penerbit Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Volume 12 (No 1), 172-195.

Al-Mawardi, Imam. 2014. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam/ Imam al-Mawardi.* penerjemah, Khalifurrahman Fath & Fathurrahman. penyunting, Ikhlas Hikmatiar. Jakarta: Qisthi.

Al-Qaradhawi, Y . 1997. *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Dar al-Shuruq.

———————— . 2019. *Al-Siyasah Al-Syar'iyyah fi Dhau' Nushush Al-Syari'ah wa Maqa shiduha.*, Terj: Fuad Syaifuddin Nur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

————————. 2019. *Pengantar Politik Islam: Al-Siyasah Al-Syar'iyyah fi Dhau' Nushush Al-Syari'ah wa Maqa shiduha*. Terj: Fuad Syaifuddin Nur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Amnesty International Indonesia. 2019, 22 Juli. *Second UA: 199/18 – Justice For Survivor of Sexual Harassment*. Di akses Juni 2026. https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/ASA2107362019ENGLISH.pdf

————————. 2024, November. *Aksi Tanggap: Buruh Ditangkap Karena Kritik Mantan Majikannya*. Amnesty International Indonesia Diakses July 2026, doi: https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/aksi-tanggap/aksi-tanggap-buruh-ditangkap-karena-kritik-mantan-majikannya/11/2024/

————————. 2025, April 4. *Putusan MK Jadi Momentum Revisi Menyeluruh Pasal-pasal Bermasalah UU ITE*. Amnesty International Indonesia. Diakses July 2026, doi: https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/putusan-mk-jadi-momentum-revisi-menyeluruh-pasal-pasal-bermasalah-uu-ite/04/2025/

Aprilianti, A. 2024. *Efektivitas dan Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Hukum Siber di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. dalam jurnal Begawan Abioso. Penerbit Universitas Krisnadwipayana, Volume 15 (No 1), 41-50.

Aprilya, P. K., & Tohawi, A. 2024. *Implementasi Prinsip Syura dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. dalam jurnal Islamic Law: Jurnal Siyasah. Penerbit Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk. Volume 9 (No 1), 1-15.

Asshiddiqie, J. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika. Jakarta

UIN IMAM BONJOL PADANG

————————. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I.* Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta

————————. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II.* Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta

————————. 2021. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta

Ayu, Raudhina O. 2025. *Tantangan Penerapan Konsep Negara Hukum dalam Era Digital: Studi Kasus UU ITE dan Kebebasan Berekspresi*. dalam Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan. Penerbit Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Volume 3 (No 4), 2408-2415.

Azhari, A., & Hilmiyyah, N. 2025*. Pendampingan Pengajaran Hadis tentang Upaya Preventif Terhadap Perilaku Ghibah dan Namimah dalam Etika Islam dan Sosial*. dalam jurnal Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat. Penerbit Universitas Nusa Bangsa. Volume 11(No 2), 197–209.

Bazary, S. S., Karsa, K., Indah, S., & Marseli, D. 2024*. Pemikiran Hukum John Locke dan Landasan Hak Asasi Manusia*. Dalam jurnal Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat. Penerbit FORIKAMI. Volume 2 (No 1), 1-25.

BeritaSatu. 2018. "UU ITE Ancam Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. Diakses September 2026. doi: https://www.beritasatu.com/news/521564/uu-ite-ancam-kebebasan-berpendapat-dan-berekspresi

Bernie, M. 2019. *UU ITE Bukan Semata Penjarakan Ahmad Dhani*. Tirto.id. Diakses pada September 2026, doi: https://tirto.id/uu-ite-bukan-semata-penjarakan-ahmad-dhani-dfm3

Budiardjo, Mariam. 1985. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.

Dachi, A. D., & Khalid, K. 2024. *Hak Warga Negara dalam Menyampaikan Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Fiqh Siyasah*. Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Penerbit Masyarakat Ekonomi Syariah dan Intelectual Association for Islamic Studies (IAFORIS). Volume 6 (No 2), 2250-2257.

Dewan Pers. 2022. *Buku Saku Wartawan*. Jakarta: Dewan Pers

Dicey, Albert. V. 1885. *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan.

Durhan, Ainun Sakinah. 2021. *Pengaruh Terpaan Informasi Kasus UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi Pengguna Media Sosial Di Kota Makassar.* Tesis. Jurusan

UIN IMAM BONJOL PADANG

Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Makassar.

Elfudllatsani, B., & Riwanto, A. 2019. *Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat dan Hak Asasi Manusia*. Dalam Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi. Penerbit Universitas Sebelas Maret. Volume 7 (No 1), 52-61.

Fadlullah, S. 2023. *Sanksi Tindak Pidana Cyberbullying Berdasarkan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Perspektif Hukum Pidana Islam*. Skripsi, Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Sunan Gunung Djati. Bandung

Fahriana, L. 2024. *Tafsir Maqâshidi: Definisi, Sejarah Perkembangan Dan Aplikasinya*. Dalam jurnal Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman. Penerbit Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Volume 14 (No 2), 317-338.

Faizah, I., Winindra, A. P., & Khoiroh, D. N. 2024. *Implementasi Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbil Mashalih terhadap Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Dalam jurnal As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Penerbit Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Volume 2 (No 1), 1-9.

Faizal, R., Holijah, H., & Bukhari, K. A. 2025. *The Constitutional Position of the Public Prosecutor's Office in Implementing Restorative Justice: A Constitutional Law Perspective and the Concept of Maslahah in Fiqh Siyasah*. dalam Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah. Penerbit STAI Syekh Abdur Rauf. Volume 8 (No 4), 974-1007.

Faylasuf, S. A. 2023. *Maqashid Al-Syariah dan Kebebasan Berkeyakinan (1)*. Bincang Syariah. Retrieved July, 2026, doi: https://bincangsyariah.com/kolom/maqashid-al-syariah-dan-kebebasan-berkeyakinan-1/

Fedira, R., Winharli, K. S., Shafira, A. S., Rahman, N. K., & Elvira, O. 2025. Judicial Review Pasal Karet UU ITE: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/Puu-Xxii/2024 Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara. dalam jurnal Media Hukum Indonesia (MHI), penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane. Volume 3 (No 3), 592-598.

GoodStats. 2023. *209,3 Juta Orang di Indonesia Menggunakan Smartphone pada Tahun 2023*. Good Stats. Diakses November 2025. doi: https://data.goodstats.id/statistic/2093-juta-orang-di-indonesia-menggunakan-smartphone-pada-tahun-2023-cbha0

————————. 2025. *Kasus Pelanggaran Kebebasan Berekspresi di Ranah Digital Terus Meningkat*. Diakses pada November 2025. doi:

https://data.goodstats.id/statistic/kasus-pelanggaran-kebebasan-bereksepresi-di-ranah-digital-terus-meningkat-0LpZi

Hadi, F. 2022. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Dalam jurnal Wijaya Putra Law Review. Penerbit Universitas Wijaya Putra . Volume 1 (No 2), 170-188.

Hardyansah, R. 2026. *Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Pencemaran Nama Baik*. Dalam Jurnal Education and Development. Penerbit Universitas Sunan Giri Surabaya. Volume 14 (No 1), 610-618.

Harijanti, Susi Dwi. 2020. *Pembatasan Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Konstitusi*. Dalam Jurnal Konstitusi. Penerbit Universitas Sebelas Maret. Volume 17 (No 2), 204-218.

Hariyanta, F. A. 2021. *Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom of Speech dalam HAM*. Dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Universitas Sebelas Maret. Volume 9 (No 2), 214-229.

HDP Lawyer. (n.d.). *UU ITE. Advokat & Konsultan Hukum Jakarta*. Diakses, July 2026, from https://www.hdplawyer.com/advokat/pencari-ilmu/matkul-siber/uu-ite

Huda, N. 2023. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Hukumonline. 2012, Oktober 8. *Jerat Hukum Bagi Penyebar Screenshot Chat WhatsApp.* Klinik Hukumonline. Diakses pada July 2026, from https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-bagi-penyebar-iscreenshot-chat-i-whatsapp-lt5073ca219c04f/

————————. 2023, Desember 4. *Ini Bunyi Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang Dianggap Pasal Karet.* Klinik Hukumonline. Diakses July 2026, from https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-27-ayat-(3)-uu-ite-yang-dianggap-pasal-karet-lt656dae151ec52

————————. 2023, Desember 5. *Seluruh Fraksi Setujui RUU Perubahan Kedua UU ITE jadi UU*. Hukumonline. Diakses July, 2026, from https://www.hukumonline.com/berita/a/seluruh-fraksi-setujui-ruu-perubahan-kedua-uu-ite-jadi-uu-lt656f209fd3cb8/

————————. 2024, February 20. *Perubahan Penting Soal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Baru*. Hukumonline. Diakses July, 2026, from https://www.hukumonline.com/berita/a/perubahan-penting-soal-pencemaran-nama-baik-di-uu-ite-baru-lt65a90c5004886/

UIN IMAM BONJOL PADANG

————————. 2024, Januari 22. *Memviralkan Fakta di Medsos, Bisa Kena Pasal Pencemaran Nama Baik?.* Klinik Hukumonline. Diakses July 2026, from https://www.hukumonline.com/klinik/a/memviralkan-fakta-di-medsos--bisa-kena-pasal-pencemaran-nama-baik-lt5d83b35260ae6/

————————. 2024, January 15. *Mengenal Tujuh Prinsip dalam Hukum Islam*. Hukumonline. Diakses July, 2026, from https://www.hukumonline.com/berita/a/tujuh-prinsip-hukum-islam-lt65a5317bf35e8/

————————. 2025. *Pasal Penyerangan Kehormatan dalam UU ITE Tak Berlaku untuk Pemerintah dan Badan Usaha*. Ini Putusan MK." 8 Januari 2025. Hukumonline. Diakses July 2026, from https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-putuskan-pasal-penyerangan-kehormatan-dalam-uu-ite-tak-berlaku-untuk-pemerintah-dan-badan-usaha-lt68107aaf92fe9/

Husni, F. 2021. *Kebebasan Berekspresi Dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyâsah Dustûriyyah*. Dalam Jurnal Ijtihad. Penerbit UIN Imam Bonjol Padang. Volume 37 (No 1), 75-86.

Ibrahim, J. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Idrus, A. M. (2021). *Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah*. Dalam jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan. Penerbit UIN Alauddin Makassar. Volume 10 (No 2), 123-137.

In'amuzzahidin, M. 2015. *Konsep Kebebasan Dalam Islam*. dalam jurnal At-Taqaddum, Penerbit UIN Walisongo Semarang. Volume 7 (No 2), 259-276.

Indriasari, D. T. 2024. *Kebebasan Berekspresi dalam Tekanan Regulasi: Studi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*. dalam jurnal Masyarakat Indonesia. Penerbit Deputy for Social Sciences and Humanities (IPSK-LIPI). Volume 49 (No 2), 243–256.

Institute for Criminal Justice Reform. (n.d). *Revisi UU ITE Harus Terbuka, Serius Menjawab Permasalahan dan Tidak Boleh Terburu-Buru*. ICJR. Diakses July 2026, from https://icjr.or.id/revisi-uu-ite-harus-terbuka-serius-menjawab-permasalahan-dan-tidak-boleh-terburu-buru/

Iqbal, M. 2014. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group

Ishak, K. 2014. *Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah.* Dalam jurnal Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita. Penerbit STIE Syariah Bengkalis. Volume 3 (No 2), 820-838.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Probolinggo. 2025, Oktober. *Penerapan UU ITE Dalam Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Masyarakat*. Diakses July, 2026, from https://jdih.probolinggokota.go.id/2025/10/04/penerapan-uu-ite-dalam-kebebasan-berekspresi-dan-berpendapat-di-masyarakat-2/

Julianja, S. 2018. *Pembatasan Kebebasan Berkespresi Dalam Bermedia Sosial: Evaluasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Dalam jurnal Padjadjaran Law Review. Penerbit Universitas Padjadjaran. Volume 6, 17-29.

Junaedi, M. 2021. *Epistemologi Fikih Indonesia: Nalar Pemikiran Hazairin*. Jurnal Syariati. Penerbit Universitas Sains Al-Qur`an Jawa Tengah. Volume 7 (No 2),153-166.

Kamali, Moh, Hashim. 1997. *Freedom of Expression in Islam*. Revised ed. Cambridge: Islamic Texts Society.

Kamma, H. Dkk. 2023. *Fiqh Siyasah: Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani*, Solok, Sumatera Barat: Mafy Media Literasi Indonesia

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. 2024. *Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2024, Mei 29. *Perubahan Kedua atas UU ITE Sah! Jamin Kepastian Hukum Ruang Digital*. Diakses July, 2026, from: https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/perubahan-kedua-atas-uu-ite-sah-jamin-kepastian-hukum-ruang-digital

Khallaf, A. W. (2003). *Al-Siyasah al-Syar'iyyah aw Nizam al-Daulah al-Islamiyah fi Syu'un al-Dusturiyah wa al-Kharijiyah wa al-Maliyah*. Siyasah Syar'iyyah Terj: Kaherah, Nur Dar al-Ansar; Jakarta: Pustaka Amani.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2020. *Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 5 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*. Jakarta: Komnas HAM.

Liputan6.com. 2026, Januari 9. *Kasus Pandji Pragiwaksono, Polda Metro Jaya Mulai Analisis Bukti Dugaan Pencemaran Nama Baik.* Diakses Januari 2026. doi: https://www.liputan6.com/news/read/6253772/kasus-pandji-pragiwaksono-polda-metro-jaya-mulai-analisis-bukti-dugaan-pencemaran-nama-baik

UIN IMAM BONJOL PADANG

LK2 FHUI. 2025, Januari). *Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Reputasi: Menakar Keadilan dalam Putusan MK terhadap UU ITE*. LK2 FHUI. Diakses July 2026, from https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/kebebasan-berekspresi-dan-perlindungan-reputasi-menakar-keadilan-dalam-putusan-mk-terhadap-uu-ite

Lubis, P. R. S. J., Rahmadani, P. D., & Gultom, I. B. 2026. *Analisis Yuridis Kebebasan Berekspresi di Era Digital: Transformasi Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 dan Perlindungan Hak Konstitusional*. Dalam jurnal Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara. Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar. Volume 4 (No 2), 10-14.

Mahfud MD, Moh. 2019. *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. Edisi Revisi

Mahkamah Agung Amerika Serikat. United States v. Schwimmer, 249 U.S. 47 (1919). Diakses pada Juni 2026 doi: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/249/47/

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku VIII: Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

————————. 2024, 13 November. *Ahli: Kegagalan Memahami Perkembangan Menyebabkan Ketentuan Pidana dalam UU ITE Rawan Disalahgunakan*. Diakses July 2026, from: https://www.mkri.id/berita/ahli:-kegagalan-memahami-perkembangan-menyebabkan-ketentuan-pidana-dalam-uu-ite-rawan-disalahgunakan-21839

————————. 2025, 29 April. *MK empertegas Pemaknaan Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE*. https://www.mkri.id/berita/mk-mempertegas-pemaknaan-unsur-unsur-pencemaran-nama-baik-dalam-uu-ite-23133

————————. 2026, 10 Februari. *Tifa, Roy, dan Rismon Uji Pasal Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan UU ITE*. https://www.mkri.id/berita/tifa,-roy,-dan-rismon-uji-pasal-pencemaran-nama-baik-dalam-kuhp-dan-uu-ite-24584

Marsaid, H. 2020. *Al-Fiqh al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*. Rafah Press.

Masferrer, A**.** 2023. *The Decline of Freedom of Expression and Social Vulnerability in Western Democracy*. Dalam jurnal International Journal on Human Rights Penerbit (Springer). Volume 36 (No 4), 1443-1475.

Maulana, I., & Idami, Z. 2020. *Perbandingan Pembatasan Hak Kebebasan Berpendapat antara Hukum Islam dengan Undang-Undang tentang Informasi*

UIN IMAM BONJOL PADANG

dan Transaksi Elektronik. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan. Penerbit Hukum Universitas Syiah Kuala. Volume 4 (No 1), 37-46.

Media Defence. (n.d.). The Right to Freedom of Expression Under International Law. In Introductory modules on digital rights and freedom of expression online: Module 1 – Key principles of international law and freedom of expression. Media Defence. Diakses Juni 2026, doi: https://www.mediadefence.org/ereader/publications/introductory-modules-on-digital-rights-and-freedom-of-expression-online/module-1-key-principles-of-international-law-and-freedom-of-expression/the-right-to-freedom-of-expression-under-international-law/

Mill, John Stuart. 1859. *On Liberty*. London: John W. Parker and Son.

Muhaemin, M. 2021. *Prinsip Tauhid Dalam Demokrasi Islam (Suatu Analisis Perspektif Teori Kedaulatan).* Dalam jurnal Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara. Penerbit Universitas Islam Negeri Datokarama Palu. Volume 2 (No 2), 156-174.

Muhaimin, M. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Munir. 2024. *Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE*. Jurnal Hukum Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum. Penerit STIH Muhammadiyah Bima. Volume 13 (No 2), 117-126.

Musolli, M. 2018. *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer.* Dalam jurnal AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman. Penerbit Universitas Nurul Jadid. Volume 5 (No 1), 60-81.

Musyawwir5275. 2017, April 8. *Konsep Siyasah Syar'iyyah dan Pelaksanaanya. Blogger.* https://musyawwir5275.blogspot.com/2017/04/konsep-siyasah-syariyyah-dan.htm

Nada, T.L. Maskur, A. 2025. *Kepastian Hukum dan Proporsionalitas Pasal Penyerangan Kehormatan dalam Revisi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik.* Dalam jurnal Hukum Legalita. Penerbit UIN Walisongo. Volume 7 (No 2), 388-397.

Nahdlatul Ulama. 2024, Mei 21. *Penguasa Tiran: Penyebab Runtuhnya Peradaban dalam Catatan Sejarah Islam*. NU Online. Retrieved from https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/penguasa-tiran-penyebab-runtuhnya-peradaban-dalam-catatan-sejarah-islam-sa7KA

Ningrat, S. R. C. & Nulhaqim, S. A. 2023. *Pasal Karet UU ITE dan Penyelesaian Konflik Digital di Indonesia.* dalam jurnal Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Sciences. Penerbit Epistemik. Volume 4 (No 2), 38-52.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Nugraha, M. R. 2025. *Gibahin Orang Lewat Grup Chat Bisa Di Pidana?.* Klinik Hukumonline. Diakses July 2026, from: https://www.hukumonline.com/klinik/a/gibahin-orang-lewat-grup-chat-bisa-dipidana-lt5106b99e70cf7/

Oegrosoeno, A. H. 2006. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Dalam jurnal Journal of International Law. Penerbit Universitas Indonesia. Volume 4 (No 1), 168-176.

Paputungan, D. Setiabudhi, D.O. Tinangon. 2026. *Penerapan Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024/PID.SUS/2025/PTBNA*. dalam jurnal Lex Crimen. penerbit Sam Ratulangi University. Volume 15 (No 2), 1-9.

Pasaribu, M. G. K. 2025. *Pembatasan Kebebasan Hak Asasi Manusia dalam Freedom of Speech*. Dalam Jurnal Honeste Vivere. Penerbit Universitas Kristen Indonesia. Volume 35 (No 1), 1-11.

PBHI. 2024, Desember 18. *Septia vs Bos dan Aparatus Negara*. PBHI. Diakses July 2026, from https://pbhi.or.id/septia-vs-bos-dan-aparatus-negara

Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. 2024. *Menggali konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Penerbit LPPM ITB AAS Indonesia. Volume 10 (No 1), 807-820.

Pinter Hukum. 2024, Juni 5. *Rumusan Baru Pasal 27B UU ITE 2024.* Diakses July, 2026, from https://pinterhukum.or.id/rumusan-baru-pasal-27b-uu-ite-2024/

Pratama, A. 2025. *Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Siyasah*. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner. Penerbit CV. Ruang Publikasi Ilmiah. Volume 1 (No 3), 1075-1087.

Prayatna, E. 2020, Mei. *Aspek Asas Legalitas*. Dialses july 2026, doi: https://www.erisamdyprayatna.com/2020/05/aspek-asas-legalitas.html

Pulungan, J. S. 2016. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Purba, A. M., Ananta, N. S., & Manurung, T. N. 2026. *Kebebasan Berpendapat sebagai Pilar Demokrasi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Journal of Management and Social Sciences Penerbit ekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar. Volume 5 (No 2), 01-10.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

UIN IMAM BONJOL

Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rae, Gradison. N. T. 2026. *Pasal Karet Dan Kriminalisasi Kebebasan Berekspresi Analisis Yuridis Terhadap Implementasi UU ITE Pasca Revesi*. dalam jurnal Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah. Penerbit UIN Alauddin Makassar. Volume 7 (No 4), 4497-4511.

Rahmad, Hendra. 2021. *Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Media Sosial Studi Terhadap UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh.

Ramadhan, M. 2019. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.

Ramadoni, S. R., Gegana, R. P., & Sanata, K. 2023. *Sejarah Undang-Undang ITE: Periodisasi Regulasi Peran Negara dalam Ruang Digital*. Langgong: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora. Penerbit Mulawarman University. Volume 3 (No 2), 41-58.

Ramathoni, L. Y., & Rizqi, A. 2025. *Dinamika Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perlindungan Hukum Dan Ancaman Kebebasan Berekspresi*. dalam jurnal Cangkal: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora. Penerbit Yayasan Pendidikan Literasi Borneo. Volume 1 (No 1), 85-93.

Raranta, E. A., Mamengko, R. S., & Karamoy, R. V. 2025. *Penerapan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Dalam Praktek Peradilan Pidana*. Dalam jurnal Lex Privatum. Penerbit Universitas Sam Ratulangi. Volume 14, 1-10.

Rasyid, M., & Norlaila, N. 2026. *Ghibah Dan Namimah.* Dalam jurnal Berajah Journal. Penerbit Lafadz Jaya . Volume 6 (No 3), 822-829.

Razqi A, & Widodo H. 2022. *Pembatasan Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Convenant on Civil and Political Rights*. Novum: Jurnal Hukum. Penerbit Universitas Negeri Surabaya. Volume 13 (No 1)1-17 .

Risman, H., Rahim, A., & Rohmah, S. N. (2022). *Batas Kebebasan Pers dan Hatespeech di Indonesia Dalam Demokrasi dan Fiqh Siyasah*. dalam Jurnal Mizan Journal o Islamic Law. penerbit Universitas Ibn Khaldum Bogor. Volume 10 (No 2), 245-266.

Ronny, R. 2025. Kajian Penerapan Pasal 27A *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada Grup Percakapan*. Locus Journal of Academic Literature Review. Penerbit Locus Media. Volume 4 (No 7), 546-552.

UIN IMAM BONJOL

Royhan, A. 2025. *Kebebasan Berekspresi Dalam Sistem Demokrasi Indonesia: Analisis Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah*. Siyasah Wa Qanuniyah. Dalam Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif. Penerbit Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif. Volume 3 (No 2), 152-173.

Salsabila, A., Ramadani, A., Lestary, C. D., Kanaya, N., & Salsabila, N. 2026. *Konsep Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah.* Dalam jurnal Albayan Journal of Islam and Muslim Societies. Penerbit Yayasan Dar Arrisyah Indonesia. Volume 3 (No 01), 82-105.

Setiawan, Z. S. Z. 2023. *Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah.* dalam jurnal Cerdas Hukum, Penerbit Institut Agama Islam Abdullah Said Batam. Volume 2 (No 1), 68-75.

Shidarta. 2021, Agustus 17. *Analisis isi Dalam Penelitian Hukum*. Business Law BINUS University.di akses Agustus 2026 doi: https://business-law.binus.ac.id/2021/08/17/analisis-isi-dalam-penelitian-hukum/

Silalahi, S. E. B., Sumarno, S., Ramadani, S., Siahaan, A. B., & Sinaga, M. B. 2026. *Non-Derobable Rights: Sebuah Kajian Filsafati* . dalam jurnal TOFEDU: The Future of Education Journal. Penerbit LPPI Yayasan Baitil Ashwatul Quran. Volume 5 (No 2), 2473-2486.

Soekanto, S., & Mamudji, S. 2011. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sulistiyawati, E., Kharamah, A., & Yamani, A. Z. 2025. *Penerapan Nilai-Nilai Siyasah Syar'iyyah dalam Kebijakan Publik Nasional.* Interdisciplinary Explorations in Research Journal. Penerbit PT. Sharia Journal and Education Center. Volume 3 (No 3), 959-968.

Sunnatullah. 2023, August 7. *3 Maslahah dalam Ushul Fiqih dan Penerapan Hukumnya.* NU Online. Diakses Juni 2026, doi: https://islam.nu.or.id/syariah/3-maslahah-dalam-ushul-fiqih-dan-penerapan-hukumnya-6mcCe

Suparman, S., Asmara, G., & Zunnuraeni, Z. 2023*. Tinjauan Kritis Pasal 27 & Pasal 28 UU ITE terhadap Kebebasan Pers*. Dalam Jurnal Risalah Kenotariatan. Penerbit Universitas Mataram. Volume 4 (No 1), 1-12.

Sya, M. A. R., Setjoatmadja, S., & Ayudyanti, I. 2026. *Transformasi Hak Berpendapat Konstitusional di Ruang Siber: Analisis Normatif Konflik Pasal 27A UU ITE dengan Pasal 28E (2)-(3) UUD 1945*. Dalam jurnal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Penerbit Universitas Diponegoro. Volume 4 (No 2), 2292-2299.

Syafi'i M., & Najib, M. 2024. *Relasi Islam Dan Demokrasi Dalam Perspektif Islam: Kajian Teoritis Dari Sudut Pandangan Tokoh*. Dalam Jurnal Daarus Tsaqofah. Penerbit Universitas Qomaruddin. Volume 1 (No 2), 107-186.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Syuhud, H., & Barat, S. S. A. P. K. 2022. *Maslahah dan Kebebasa Dalam Fiqh Telaah Filosofis Konsep Maslahah al-Mursalah Persfektif al Ghazali*. Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat. Volume 1 (No 1), 30-56.

Tampubolon, M., Simanjuntak, N., & Silalahi, F. 2023. *Hukum dan Teori Konstitusi*. PT Global Eksekutif Teknologi

Taqwa, M. D. 2025. *Penelusuran Ide Proportionality dalam Pasal 28J (2) UUD NRI Tahun 1945*. Jurnal Konstitusi. Penerbit Kostitusi. Volume 22 (No 3), 483-507.

Tarigan, Imanuel T. 2023. *Kebebasan Berekspresi Di Era Digital Di Indonesia (Studi Analisis Melalui Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik)*. Tesis. Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Medan.

Tatsqif. 2024. *Sumber hukum Islam muttafaq: Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Tatsqif Media Dakwah & Kajian Islam*. https://tatsqif.com/sumber-hukum-islam-muttafaq-al-quran-hadis-ijma-dan-qiyas/

Tempo.co. 2025, April 29. *MK Putuskan Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Tidak Berlaku Untuk Pemerintah, Korporasi, dan Kelompok*. Diakses July 2026, from: https://www.tempo.co/hukum/mk-putuskan-pasal-pencemaran-nama-baik-di-uu-ite-tidak-berlaku-untuk-pemerintah-korporasi-dan-kelompok--1334456

Umami, S., Rizman, I. A., & Putra, R. A. 2025. *Penerapan Prinsip Fiqih Siyasah dalam Kepemimpinan Modern: Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer*. Equality: Law and Social. Penerbit PT. Riset Anak Bangsa. Volume 1 (No 1), 27-33.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28E dan 28F

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

United Nations. (n.d). *History of The Declaration*. Diakses Juni 2026. doi: https://www.un.org/en/about-us/udhr/history-of-the-declaration

UIN IMAM BONJOL PADANG

————————. 1948. *Universal Declaration of Human Rights. New York: United Nations*. Diakses Juni 2026 doi: https://www.ohchr.org/en/universal-declaration-of-human-rights

United Nations Human Rights Committee. 1966. *International Covenant on Civil and Political Rights*. Office of the High Commissioner for Human Rights. Diakses November 2025. doi: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights

————————. 1985. *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*. U.N. Doc. E/CN.4/1985/4, Annex

————————. 2011. *General Comment No. 34: Article 19 – Freedoms of opinion and expression*. Diakses Februari 2026. doi: General comment No.34 on Article 19: Freedoms of opinion and expression | OHCHR

Universitas Al-Azhar Indonesia. 2021. *Diharapkan Revisi Tak Dibatasi 4 Pasal dalam UU ITE*. diakses September 2026. doi: https://uai.ac.id/diharapkan-revisi-tak-dibatasi-4-pasal-dalam-uu-ite/

Wahjono, Padmo. (2026). *Indonesia ialah Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum. Jurnal Hukum & Pembangunan*. Dalam jurnal Indonesian Journal of International Law. Penerbit Universitas Indonesia. Volume 10 (No 1) 1-10.

Wahyuni, R., & Desiandri, Y. S. 2024. *Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Berekspresi dalam Negara Demokrasi di Indonesia*. dalam jurnal Sains Dan Teknologi. Penerbit CV. Utility Project Solution. Volume 5 (No 3), 961-966.

Wardana, D. A., & Paralian, H. 2024. *Implementasi Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar Sebagai Etika Politik*. Dalam Jurnal Ushuluddin. Penerbit UIN Sumatera Utara. Volume 22 (No 2), 85-116.

Yamin, B., & Rachman, M. T. 2025. *Problematik Yuridis Pasal 2 KUHP Baru Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Dasar Asas Legalitas*. Dalam jurnal Unizar Law Review. Penerbit Unizar. Volume 8 (No 2), 170-180.

Yoga, S. J. 2022. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pembatasan Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dalam Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jurusan Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Zed, M. 2025. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

UIN IMAM BONJOL